

## Dari Masyumi Ke Partai Bulan Bintang: Kontinuitas Ideologi dan Pengaruhnya dalam Politik Pemerintahan Indonesia

Khoirun Nisa<sup>1\*</sup>, Kamal Yusuf<sup>2</sup>, Syachrazad Niken Basuki<sup>3</sup>,  
Huda Binti Mohd Fadzil<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup> Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

\* [khoirunnisaafzz@gmail.com](mailto:khoirunnisaafzz@gmail.com)

### Abstrak

Masyumi merupakan partai Islam modernis terbesar pada era demokrasi parlementer yang menekankan demokrasi, ekonomi syariah, dan antikomunisme. Pembubarannya oleh Presiden Soekarno pada 1960 menghilangkan wadah politik Islam modernis. Pada era Reformasi, Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan untuk melanjutkan perjuangan Masyumi, tetapi menghadapi tantangan besar dalam meraih dukungan politik yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontinuitas ideologi dan perbedaan antara Masyumi dan Partai Bulan Bintang dalam dinamika politik Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB mewarisi landasan ideologis Masyumi, terutama dalam menjadikan Islam sebagai prinsip utama perjuangan politik, partai ini tidak mampu mengulangi kesuksesan historis pendahulunya. Faktor-faktor seperti perubahan lanskap politik nasional, menurunnya basis pemilihan ideologis, serta dinamika internal partai turut mempengaruhi lemahnya posisi PBB di panggung politik nasional. Kajian ini menegaskan bahwa keberlanjutan ideologi tidak menjamin keberhasilan politik apabila tidak diikuti dengan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Masyumi; Partai Bulan Bintang; Ideologi Islam.

*Submissions:*

28-04-2025

*Accepted:*

01-07-2025

*Published:*

01-07-2025



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons  
Attribution 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### Abstract

*Masyumi was the largest modernist Islamic party in the era of parliamentary democracy, emphasizing democracy, sharia economics, and anti-communism. Its dissolution by President Sukarno in 1960 removed the political platform for modernist Islam. In the reform era, the Bulan Bintang Party (PBB) was formed to*

*continue Masyumi's struggle, but it faced major challenges in gaining significant political support. This research aims to analyze the continuity and differences between Masyumi and the Crescent Star Party in the dynamics of Islamic politics in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with a literature review approach. The results show that although PBB inherited the ideological foundation of Masyumi, especially in making Islam the main principle of political struggle, the party was unable to repeat the historical success of its predecessor. Factors such as changes in the national political landscape, the decline of the ideological voter base, and internal party dynamics have contributed to the UN's weak position on the national political stage. This study emphasizes that ideological continuity does not guarantee political success if it is not followed by adaptability to the challenges of the times.*

**Keywords:** Masyumi; Bulan Bintang Party; Ideological Legacy.

## PENDAHULUAN

Pada masa awal perkembangan politik di Indonesia, dinamika budaya politik sangat dipengaruhi oleh dominasi agama Islam, mengingat Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. umat Islam tidak luput dari perdebatan dan konflik internal yang bersifat teoritis maupun ideologis. Perbedaan pandangan ini tidak hanya terjadi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler, tetapi juga terjadi di antara sesama umat Islam itu sendiri. Perbedaan pandangan di kalangan umat Islam pada awal kemerdekaan Indonesia mendorong terbentuknya berbagai partai politik dalam sistem multipartai. Partai-partai tersebut terbagi menjadi dua golongan utama: partai berbasis agama yang merepresentasikan aspirasi politik umat Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, Perti, dan lainnya; serta partai sekuler dan nasionalis seperti PNI dan PKI, yang tidak menjadikan agama sebagai dasar politik mereka (Sahya, 2013).

Sejarah politik Indonesia tak bisa dipisahkan dari kontribusi partai-partai Islam yang berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Salah satu partai Islam yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik nasional adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini didirikan pada 7 November 1945 dalam Mukhtamar Umat Islam yang diadakan di Gedung Muallimin, Yogyakarta (Siregar, 2013). Sebagai partai politik yang berasaskan Islam, Masyumi menjadi satu-satunya partai Islam yang muncul pada periode awal kemerdekaan. Keberadaan Masyumi memperoleh dukungan besar dari berbagai organisasi keagamaan yang sudah lebih dahulu berdiri, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), serta beberapa

organisasi Islam lainnya. Dengan dukungan luas dari berbagai kelompok keagamaan, Masyumi berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia pada masa itu (Ma'afi, 2013).

Dalam proses pembangunan politik di Indonesia Masyumi berperan penting dalam memperkuat identitas Islam di kancah politik Indonesia. Sebagai partai Islam berpengaruh, Masyumi tidak hanya menjadi wadah aspirasi umat Islam tetapi juga aktif dalam pemerintahan, menjadikannya salah satu kekuatan politik utama pada masanya. Keterlibatan Masyumi dalam pemerintahan memungkinkan partai ini berkontribusi dalam pembentukan kebijakan nasional, khususnya terkait nilai-nilai Islam dalam politik. Pengaruhnya terhadap arah politik Indonesia bertahan hingga tahun 1960, sebelum akhirnya dibubarkan oleh pemerintah (Rahman, 2017).

Gagasan, nilai, dan cita-cita politik yang pernah diperjuangkan oleh Masyumi terus berlanjut dalam berbagai bentuk, terutama setelah era reformasi. Pemikiran politiknya tetap menjadi inspirasi bagi sejumlah kelompok Islam, termasuk dalam pendirian Partai Bulan Bintang (PBB) pada tahun 1998. Sebagai partai politik yang lahir di era demokrasi, PBB mengadopsi banyak prinsip perjuangan Masyumi, khususnya dalam upaya menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem politik yang demokratis dan modern (Iman, 2023).

Dengan membawa semangat Islam modernis yang pernah diperjuangkan oleh Masyumi, PBB berusaha menyesuaikan diri dengan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Partai ini menekankan pendekatan politik yang inklusif dan konstitusional, sambil tetap mempertahankan visi Islam sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Irsyad, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa warisan ideologi Masyumi masih tetap hidup dan berkontribusi dalam perkembangan politik Islam di Indonesia melalui partai bulan bintang.

Kajian terdahulu yang mencakup beberapa literatur tentang Masyumi. Adapun judul artikelnya *Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama* oleh Abdul Rahman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyumi didirikan oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai alat mobilisasi umat Islam untuk mendukung Perang Pasifik. Jepang lebih mengandalkan kyai pedesaan daripada partai Islam perkotaan. Masyumi awalnya bukan partai, melainkan federasi organisasi Islam yang diizinkan saat itu. Setelah kemerdekaan, Masyumi berkembang menjadi partai politik dan mendirikan surat kabar *Abadi* pada 1947 (Rahman, 2017).

Sementara itu, terdapat juga penelitian yang membahas tentang Masyumi yang ditulis oleh Tomi Nurdamarsah dengan judul *Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959*. Hasil penelitian ini mengkaji tentang peran Partai Masyumi pada periode 1950-1959 memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika pergerakan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan kepada dosen, mahasiswa, guru, dan umat Islam perlu memahami makna perjuangan Islam dalam konteks kebangsaan (Nurdamarsah, 2018).

Literatur lainnya terdapat pada karya Khuswatun Hasanah *Sikap Politik Prawoto Mangkusasmito terhadap Pembubaran Partai Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prawoto Mangkusasmito tetap loyal pada keputusan pembubaran Partai Masyumi oleh Soekarno, meskipun ia sebelumnya aktif memperjuangkan partai tersebut. Sikap politiknya didasari oleh komitmen terhadap keutuhan negara dan keyakinan bahwa perjuangan Islam tetap dapat dilanjutkan secara konstitusional di masa depan (Hasanah, 2022).

Adapun beberapa literatur terdahulu yang meneliti tentang Partai Bulan Bintang terdapat pada jurnal yang berjudul *Penurunan Suara Partai Islam Pada Pemilu Legislatif: Partai Bulan Bintang (PBB) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019* ditulis oleh Adlin. Penurunan suara PBB pada Pemilu 2019 disebabkan oleh keputusan elite partai mendukung Jokowi-Ma'ruf yang tidak sesuai dengan aspirasi pemilih Islam modernis. Hal ini diperparah oleh karakter pemilih yang ideologis, kepercayaan diri elite yang berlebihan, dan seruan ulama untuk tidak mendukung PBB (Adlin, 2019).

Literatur lainnya yang mengkaji tentang Partai bulan Bintang terdapat pada karya Nurjannah yang berjudul *Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional*. Hasil penelitian ini membahas tentang dinamika Partai Bulan Bintang dalam perpolitikan Indonesia dipengaruhi oleh peran tokoh, perkembangan global, proses kaderisasi, serta kondisi politik nasional (Nurjannah, 2015).

Dari sejumlah kajian tentang Masyumi dan partai Bulan Bintang masih belum ditemukan adanya kajian mengenai kesinambungan ideologi Islam Masyumi terhadap Partai Bulan Bintang. Selain itu, perbandingan peran politik antara Masyumi dan Partai Bulan Bintang juga masih jarang diteliti. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya menganalisis kesinambungan, perbedaan, dan dampak politik dari kedua partai tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontinuitas ideologi Islam antara Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang, serta menganalisis peran keduanya dalam dinamika politik Indonesia, khususnya dalam konteks representasi mereka di parlemen. Secara spesifik, kajian ini fokus pada bagaimana kedua partai memperjuangkan aspirasi politik Islam dalam ruang legislatif dan menghadapi tantangan yang berbeda di masing-masing era, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kesinambungan dan transformasi politik Islam di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis kesinambungan ideologi, perbedaan strategi, dan pengaruh antara Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang (PBB). Data diperoleh dari sumber primer seperti risalah sidang konstituante, surat kabar *Abadi*, memoar tokoh, serta dokumen resmi partai. Sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang relevan (Karima et al., 2023). Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu kesinambungan ideologi, perbedaan strategi politik, serta pengaruh Masyumi terhadap PBB dalam konteks politik Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan ideologi serta strategi politik antara Masyumi dan PBB. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang transformasi politik Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesinambungan dan perubahan dalam ideologi serta strategi politik kedua partai tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Berdirinya Masyumi dan Partai Bulan Bintang

Berdirinya Masyumi dilatarbelakangi oleh anjuran pembentukan partai politik melalui Maklumat Pemerintah No. X pada 3 November 1945, hal ini membuat berbagai partai bermunculan (Amri, 2024) Awalnya, ada rencana membentuk satu partai nasional, tetapi dibatalkan untuk menghindari kesan

fasisme. Secara ideologi, partai-partai yang lahir dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, partai berideologi Islam yang diwakili oleh Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, partai nasionalis sekuler yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketiga, partai berideologi Marxis-Sosialis yang diwakili oleh Partai Sosialis (10 November 1945), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Sosialis (pimpinan Sutan Syahrir), dan Pesindo (Fahri, 2022).

Masyumi dibentuk dalam Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7-8 November 1945, dengan tujuan menjadi satu-satunya partai Islam yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Kepemimpinannya mencakup berbagai tokoh Islam, seperti KH Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro, KH Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Moh. Natsir, dan lainnya (Cecep Suryana, 2024). Awalnya, Masyumi beranggotakan Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. dalam perkembangannya, hampir seluruh organisasi Islam di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun lokal, turut bergabung, kecuali Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang tetap berdiri sendiri. Dalam waktu singkat, Masyumi berkembang pesat dan menjadi partai politik terbesar di Indonesia, bahkan mampu mengungguli Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam hal pengaruh dan jumlah pendukung (Romli, 2020).

Setelah berdiri, Partai Masyumi berkembang pesat secara kuantitatif karena banyak organisasi Islam di berbagai daerah bergabung. Awalnya, Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam bergabung, disusul Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di Medan pada akhir November 1945, yang resmi melebur ke Masyumi pada 6 Februari 1946. Langkah ini memperkuat posisi Masyumi di Sumatera Utara. Kemudian, organisasi lain seperti Dewan Tinggi di Bukittinggi dan Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) di Kalimantan Selatan juga bergabung. Pada 1948, organisasi seperti Persatuan Islam di Bandung, Al-Ittihadiyah, dan Jamiyatu Al-Wasliyah di Sumatera Utara menyusul bergabung. Pada 1950, Al-Irsyad ikut bergabung, diikuti oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Mathla'ul Anwar di Banten, dan Nahdlatul Wathan di Lombok pada 1959. Semua organisasi ini diberi status "anggota istimewa" seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memperkuat jaringan Masyumi di seluruh Indonesia (Asrofuddin et al., 2023).

Partai Masyumi dengan piawai memainkan politik identitas Islam secara positif, menarik berbagai kalangan umat Islam. Mereka mendirikan organisasi-organisasi otonom untuk memperluas basis dukungan, seperti Serikat Tani Islam

Indonesia (STII) di Yogyakarta (1946), Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) di Solo (1947), dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) pada 1950. Kekuatan Masyumi makin bertambah ketika Hizbullah, organisasi semi-militer yang berdiri pada 3 Oktober 1944, memberikan dukungan. Hizbullah, yang berasal dari kalangan muda Muhammadiyah dan NU, memiliki 20.000–25.000 anggota, memperkuat posisi Masyumi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Asrofuddin et al., 2023).

Masyumi didirikan dengan tujuan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Di masa awal kemerdekaan, Masyumi tampil sebagai kekuatan politik Islam yang aktif memperjuangkan kemerdekaan, baik melalui perlawanan fisik maupun diplomasi. Tokohnya, Mohammad Roem, memainkan peran penting dalam keberhasilan Perjanjian Roem-Royen yang memungkinkan kembalinya Soekarno-Hatta ke Yogyakarta. Sementara itu, Syafruddin Prawiranegara turut berjasa dalam mempertahankan kedaulatan melalui pembentukan Pemerintahan Darurat RI saat ibu kota diduduki Belanda. Peran-peran ini menunjukkan kontribusi signifikan Masyumi dalam sejarah perjuangan bangsa (Nurdamarsah, 2018).

Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 merupakan puncak dari ketegangan politik antara partai ini dengan Presiden Soekarno yang mengusung konsep Demokrasi Terpimpin. Masyumi, sebagai partai Islam modernis yang memiliki pengaruh besar pada masa itu, menolak gagasan Demokrasi Terpimpin karena dinilai mengarah pada otoritarianisme dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya. Masyumi berpendapat bahwa sistem tersebut akan mengurangi peran parlemen dan memusatkan kekuasaan di tangan Presiden (Ibrahim, 2023).

Partai ini juga menentang kebijakan pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai reaksi, Masyumi memutuskan untuk tidak bergabung dalam kabinet yang dibentuk oleh Soekarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 1945. Masyumi mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka dan bebas dari intervensi ideologi tertentu, seperti komunisme, yang menurut mereka bertentangan dengan ajaran Islam (Fadli, 2020).

Penolakan Masyumi terhadap Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan sikap partai-partai Islam lainnya, seperti NU dan PSII, yang mendukung gagasan tersebut. Seiring dengan meningkatnya tekanan politik, Soekarno menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan Masyumi. Pada tahun 1960, Masyumi

akhirnya dibubarkan dengan alasan bahwa partai ini tidak mendukung ideologi negara yang sudah ditetapkan. Pembubaran Masyumi menandai berakhirnya peran politik penting partai Islam modernis dalam kancah politik Indonesia pada masa itu dan memperkuat cengkeraman rezim Soekarno yang semakin otoriter (Hasanah, 2022).

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai politik Islam di Indonesia yang didirikan pada 17 Juli 1998 dan mengklaim sebagai penerus Masyumi. (Anggiawan, 2015) Ketua umum pertama PBB adalah Yusril Ihza Mahendra, yang berperan dalam amandemen konstitusi pasca-reformasi. Pada 2005, MS Kaban menggantikannya dan kembali terpilih dalam Mukhtar III tahun 2010, didampingi BM Wibowo Hadiwardoyo sebagai Sekjen, serta Yusril Ihza Mahendra dan Fuad Amsyari dalam kepemimpinan partai (Al-Hamdi, 2013).

Saat ini, kepengurusan PBB periode 2019-2024 dipimpin oleh Dr. Fahri Bachmid, SH, MH, sebagai Penjabat Ketua Umum, dengan Ir. H. Mohammad Masduki, SH, MH, sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hj. Kenia Khairunnisa Mehendra, S.Sos., M.M., sebagai Bendahara Umum. Selain itu, beberapa wakil ketua umum turut serta, termasuk Randy Bagasyudha, S.Psi, MIP, yang menangani bidang Organisasi & Pemerintahan, serta Dr. Dr. Norman Zainal, SpOT, M.Kes., yang bertanggung jawab atas Kaderisasi & Pemenangan pemilu. (Saptohutomo, 2024)

Partai Bulan Bintang (PBB) lahir dalam konteks reformasi politik Indonesia pasca-Soeharto, sebagai respons atas kerinduan sebagian kalangan umat Islam terhadap eksistensi partai Islam yang bersih dan idealis. Keberadaan PBB juga dipengaruhi oleh sikap kritis terhadap dominasi kekuasaan sekuler selama Orde Baru dan adanya ketidakpuasan terhadap fusi partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973. Para pendiri PBB, termasuk Yusril Ihza Mahendra, menginginkan adanya wadah politik baru yang lebih tegas membawa aspirasi umat Islam dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, PBB bukan hanya dibentuk sebagai reaksi atas keterbatasan politik umat Islam pada masa lalu, tetapi juga sebagai upaya merumuskan kembali peran politik Islam yang inklusif dan kontekstual dalam sistem politik Indonesia yang plural dan demokratis (Irsyad, 2016).

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai Islam ideologis, yakni partai yang berasaskan dan berlandaskan ideologi Islam. PBB berpegang teguh pada akidah serta ajaran Islam sebagai pedoman utama, dengan tujuan membangun masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Masyarakat yang

dicita-citakan adalah masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil, makmur secara merata, serta maju. Selain itu, PBB berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dengan mengharapkan ampunan serta ridha Allah SWT (Permatasari, 2014).

### **Kontinuitas Ideologi dan Nilai Politik Islam dari Masyumi ke Partai Bulan Bintang**

Pada masa Orde Lama, Partai Masyumi menjadi simbol politik Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan simbol-simbol keislaman. Masyumi bertujuan menyatukan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. Lahir dari perlawanan non-fisik terhadap kolonialisme Belanda, Masyumi tumbuh bersama semangat nasionalisme di kalangan umat Islam modernis dan tradisional (Supawi, 2023).

Dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta, selain mendirikan partai, para tokoh Islam juga mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dua poin penting dalam resolusi tersebut adalah memperkuat persiapan jihad dan memperkuat pertahanan negara sesuai ajaran Islam. Masyumi menjadi wadah politik bagi kelompok Islam yang sebelumnya gagal mewujudkan Islam sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta. Melalui anggaran dasar dan program perjuangannya, Masyumi menegaskan tujuan untuk menerapkan ajaran dan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan serta menjaga kedaulatan negara melalui jalur demokrasi dan konstitusional (Argenti, 2020).

Dalam sidang BPUPKI (29 Mei–1 Juni & 10–17 Juli 1945), terjadi perdebatan tajam antara kelompok Islam yang mengusulkan negara bersyariat dan kelompok nasionalis yang menginginkan negara inklusif. Untuk mencari jalan tengah, dibentuk Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, dengan kompromi tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Peristiwa ini mencerminkan pergeseran visi politik Masyumi. Dari semula mengusung negara Islam, Masyumi kemudian lebih menekankan pentingnya pelaksanaan syariat Islam bagi umat Muslim dalam kerangka negara Indonesia. Islam tetap menjadi dasar moral dan pedoman hukum, namun dalam format negara yang inklusif (Asrofuddin et al., 2023).

Masyumi didirikan dengan keyakinan bahwa ajaran Islam mencakup berbagai prinsip ideologi, menjadikannya sebagai landasan utama dalam

menentukan arah dan kebijakan partai. Berdasarkan Anggaran Dasar 1945, Masyumi bertujuan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Islam serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Di awal berdirinya, partai ini berfokus pada perjuangan melawan penjajahan dan membangun negara berdasarkan kedaulatan rakyat serta keadilan Islam. Masyumi juga berupaya menyempurnakan dasar UUD RI untuk mewujudkan masyarakat Islam. Selain itu, Masyumi mendukung pemilihan umum langsung dan, melalui program aksi 17 Desember 1945, menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan sosial, perdamaian antarbangsa, serta penolakan terhadap kapitalisme dan imperialisme (Rahman, 2017).

Pada masa kemerdekaan, kondisi politik menuntut sikap tegas terhadap penjajahan, sehingga visi dan misi partai seperti Masyumi disampaikan secara padat namun tetap dimengerti oleh masyarakat. Sukiman, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Masyumi setelah pendiriannya, menyampaikan bahwa saat perumusan UUD 1945, umat Islam menginginkan kemerdekaan Indonesia berdasar Islam. Tuntutan ini mencerminkan aspirasi politik umat Islam, sebagaimana kelompok lain seperti sosialis juga ingin Indonesia berdasar ideologi mereka sendiri (Rahman, 2017).

Pada awalnya, Masyumi belum memberikan penjelasan tegas mengenai ideologinya, namun identitas Islamnya tampak jelas dalam pola pikir, keputusan, serta penggunaan istilah Islam dalam AD/ART dan resolusi partai. Selama perang kemerdekaan, Masyumi menyerukan jihad *fi sabilillah* melawan penjajah dan menyatakan tujuan menegakkan kedaulatan negara serta agama Islam. Bagi Masyumi, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial, berdasarkan prinsip *hablun minallah* dan *hablun minannas*. Ketua Umum Mohammad Natsir menegaskan bahwa ajaran Islam mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun Manifesto Politik 1947 telah menyebutkan ideologi Islam, perumusan resmi baru dilakukan setelah kemerdekaan. Pada Mukhtamar VI tahun 1952, Masyumi secara tegas menetapkan Islam sebagai asas partai dan menyusun Tafsir Asas sebagai pedoman ideologis (Wiharsono, 2024).

Masyumi, yang dipengaruhi pemikiran Islam modern, memandang Islam sebagai ajaran universal yang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Mereka mendorong ijtihad, keterbukaan terhadap pemikiran luar, dan adaptasi nilai demokrasi. Demokrasi menurut Masyumi harus berlandaskan musyawarah dan kedaulatan rakyat sebagai amanah dari Tuhan, bukan sekuler seperti demokrasi

Barat atau diktator seperti dalam Marxisme. Masyumi menegaskan pentingnya partisipasi rakyat melalui pemilihan umum, seperti diwujudkan dalam keberhasilan Pemilu 1955. Prinsip dasarnya menempatkan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga semua keputusan politik tetap memiliki pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan (Khumaidi & Sumarno, 2021).

Partai Bulan Bintang (PBB) mengklaim sebagai penerus Partai Masyumi, dengan tetap mempertahankan ideologi Islam sebagai dasar perjuangan politiknya. Seperti Masyumi, PBB berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperjuangkan syariat Islam dalam kerangka konstitusi Indonesia. Selain itu, PBB juga melanjutkan tradisi intelektual dan politik Masyumi, yang dikenal dengan pendekatan rasional, moderat, serta keterlibatannya dalam politik konstitusional. Namun, meskipun mewarisi nilai-nilai Masyumi, PBB menghadapi tantangan yang berbeda, termasuk perubahan lanskap politik di era Reformasi yang lebih kompetitif, serta munculnya berbagai partai Islam lainnya yang turut bersaing dalam arena politik nasional (Khasanah & Hamzani, 2019).

Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki ikatan emosional dengan Partai Masyumi, yang dulu pernah memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. PBB menganggap dirinya sebagai penerus cita-cita Masyumi. Awalnya, ada keinginan kuat untuk menggunakan kembali nama Masyumi sebagai nama partai, namun setelah mempertimbangkan beban moral dan menjaga integritas nama besar tokoh-tokoh Masyumi di masa lalu, akhirnya dipilihlah nama Partai Bulan Bintang (PBB). Pemilihan nama tersebut diserahkan kepada dua tokoh senior Masyumi, yaitu Affiandi Ridhwan dan Anwar Harjono. Menurut Anwar Harjono, Bulan Bintang adalah bagian yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi dari mata uang yang sama dengan Masyumi (Permatasari, 2014).

Ideologi Islam PBB berpijak pada prinsip bahwa Islam harus menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengubah bentuk negara menjadi negara Islam. PBB memperjuangkan penerapan syariat Islam terutama dalam aspek ibadah individu (seperti shalat, puasa, haji) dan hukum keluarga (seperti perkawinan dan kewarisan) bagi umat Islam, dengan tetap menjaga kebebasan beragama untuk seluruh warga negara (Irsyad, 2016).

Dalam bidang hukum publik, PBB mendorong agar nilai-nilai Islam yang bersifat universal ditransformasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Mereka menginginkan Islam menjadi inspirasi moral dalam politik dan pemerintahan, bukan dipaksakan secara formalistik kepada semua warga negara. PBB mewarisi

semangat pemikiran Mohammad Natsir, yakni memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konstitusi dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan NKRI, pluralisme, dan hak asasi manusia. Islam dipahami sebagai ajaran yang mendukung akhlak mulia, keadilan sosial, dan toleransi terhadap pemeluk agama lain (Irsyad, 2016).

### **Pengaruh Politik Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang di Pemerintahan**

Pada era Demokrasi Parlemerter (1945-1959), Partai Masyumi muncul sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Dengan basis massa yang kuat dari kalangan santri dan kelas menengah Islam, Masyumi berhasil menempatkan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan, termasuk Mohammad Natsir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai ini dikenal dengan gagasan Islam modernis yang tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Keberadaannya begitu berpengaruh hingga sering menjadi bagian dari kabinet pemerintahan (Nurdamarsah, 2018).

Pada masa revolusi Indonesia, Masyumi memainkan peran penting dalam dinamika pemerintahan. Awalnya, sistem presidensial diganti menjadi sistem parlementer dengan Kabinet Sjahrir I pada November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I hingga III (1945-1947), Masyumi bersikap sebagai oposisi meski beberapa anggotanya masuk kabinet secara pribadi. Kabinet Sjahrir III runtuh setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati. Kabinet berikutnya dipimpin Amir Syarifuddin. Karena gagal menggandeng Masyumi, Amir mengajak PSII bergabung ke kabinet. PSII kemudian keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri, yang menjadi pukulan bagi persatuan umat Islam. Dalam Kabinet Amir II, Masyumi ikut serta, berharap bisa memengaruhi jalannya perundingan dengan Belanda, namun gagal karena munculnya Perjanjian Renville (Cecep Suryana, 2024).

Setelah konflik internal, Amir menyerahkan mandatnya, lalu terbentuk Kabinet Mohammad Hatta yang bersifat "ekstra kabinet" bertanggung jawab kepada Presiden, bukan parlemen. Kabinet ini diisi oleh Masyumi dan PNI, masing-masing empat kursi, dan menangani empat isu besar: pemberontakan Darul Islam, dampak Perjanjian Renville, proses menuju penyerahan kedaulatan lewat KMB, serta pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Saat Agresi Militer Belanda II, Masyumi menunjukkan peran kunci dalam menjaga eksistensi Republik. Ketika para pemimpin nasional ditangkap, tokoh Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara, membentuk PDRI di Sumatra Tengah. Inisiatif ini mencegah kekosongan kekuasaan

dan menggagalkan klaim Belanda bahwa Indonesia telah menyerah (Cecep Suryana, 2024).

Partai Masyumi menempuh tiga jalur utama untuk mencapai tujuannya: kekerasan, keterlibatan dalam pemerintahan, dan diplomasi. Melalui kekerasan, Masyumi menyerukan jihad melawan penjajah yang dianggap telah merendahkan Islam, dengan perjuangan bersenjata dipandang sebagai kewajiban agama (*fardhu 'ain*). Selain itu, Masyumi aktif dalam pemerintahan dengan menempatkan tokoh-tokohnya di kabinet, parlemen, dan administrasi negara, memanfaatkan jalur politik untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara konstitusional. Masyumi juga mengembangkan diplomasi internasional demi memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Secara organisatoris, Masyumi membagi peran menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan penasihat melalui Mukhtar, Pimpinan Partai, dan Majelis Syura (Ishaqro, 2015).

Pada pemilu legislatif 29 September 1955, Partai Masyumi berhasil meraih sekitar 37 juta suara, setara dengan 20,9%. Namun, pada pemilu untuk memilih anggota Konstituante pada 15 Desember 1955, partai ini hanya memperoleh 112 kursi di lembaga yang bertugas merumuskan konstitusi baru. Dengan keikutsertaannya dalam proses demokrasi, Masyumi menunjukkan komitmennya untuk menggunakan jalur hukum dan konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam, tanpa mengandalkan kekerasan. Meskipun ada sebagian kecil umat Islam yang mengkritik demokrasi sebagai sistem yang lahir dari peradaban Barat yang sekuler, Masyumi memilih untuk menerima demokrasi sebagai cara yang sah dalam perjuangan politik. Partai ini menilai kesabaran sebagai inti dari perjuangannya, memilih untuk berkompetisi melalui mekanisme demokrasi sebagai langkah yang lebih bijaksana dibandingkan dengan kekerasan atau penggunaan kekuatan militer (Argenti, 2020).

Sedangkan di era Reformasi, semangat politik Islam yang diusung Masyumi kembali diwujudkan dalam Partai Bulan Bintang (PBB). Partai ini mengklaim sebagai penerus perjuangan Masyumi, tetapi realitas politik yang dihadapi jauh berbeda. Sejak berdiri pada 1998, PBB kesulitan mendapatkan dukungan luas dan gagal menjadi kekuatan utama dalam parlemen. Tidak seperti Masyumi yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan, PBB justru lebih sering berperan dalam advokasi hukum dan gerakan keislaman di luar parlemen. Basis dukungan partai ini pun terbatas, terutama karena kehadiran partai-partai Islam lain seperti PKS dan PAN yang lebih mampu menarik suara umat Islam (Thalib, 2019).

Dalam Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang (PBB) dikategorikan sebagai partai Islam berhaluan kanan, yang mendukung peran agama dalam negara. PBB juga cenderung menempati posisi populis dalam hubungan antara elite dan konstituen, dengan ikatan emosional dan simbolik yang kuat berbasis identitas keagamaan dan warisan Masyumi. Pendekatan ini menonjolkan simbol Islam sebagai daya tarik politik, namun kurang menekankan pada tawaran kebijakan rasional atau program yang konkret. (Mayrudin, 2017) Hal ini dapat dilihat dalam Pemilu 1999, PBB meraih 2% suara dengan 13 kursi di DPR, kemudian memperoleh 2,62% suara dan 11 kursi pada Pemilu 2004. Namun, pada Pemilu 2009, perolehan suara turun menjadi 1,7%, sehingga tidak memenuhi ambang batas parlemen 2,5% dan kehilangan kursi di DPR (Adlin, 2019).

Sosok Yusril Ihza Mahendra menjadi figur sentral partai, bahkan identitas politik PBB kerap dipersonifikasikan melalui kepemimpinannya. Di bawah Yusril, PBB berhasil masuk parlemen pada Pemilu 1999 dan 2004, namun sejak Pemilu 2009 perolehan suaranya terus menurun hingga gagal menempatkan wakil di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Meski demikian, PBB tetap memiliki pengaruh di tingkat lokal melalui kursi DPRD di sejumlah daerah. Penurunan dukungan terhadap PBB disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk melemahnya ikatan ideologis umat Islam terhadap partai Islam, fragmentasi antar partai Islam, serta munculnya pragmatisme politik di kalangan pemilih Muslim. Selain itu, transformasi sosial-politik pasca-Orde Baru dan disorientasi ideologis di internal partai juga turut melemahkan daya tarik politik PBB dalam kancah nasional (Adlin, 2019).

Kiprah Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai pewaris ideologis Masyumi menunjukkan bahwa pencantuman Islam sebagai ideologi partai tidak otomatis menghasilkan kemenangan elektoral. Sejak awal reformasi, PBB mengalami penurunan suara dan gagal lolos ke parlemen, menandakan bahwa pendekatan eksklusif berbasis Islam kurang relevan di tengah perubahan lanskap politik Indonesia. Pemilih Muslim kini lebih mempertimbangkan program, tokoh, dan isu aktual dibanding identitas ideologis formal. Kegagalan PBB merefleksikan bahwa kontinuitas ideologis tanpa strategi adaptif tidak cukup untuk mempertahankan pengaruh politik seperti yang pernah diraih Masyumi (Shobron, 2013).

Dengan demikian, meskipun PBB mengusung nilai-nilai yang serupa dengan Masyumi, pengaruh politik keduanya sangat berbeda. Masyumi pernah menjadi kekuatan besar yang menentukan arah pemerintahan di era Demokrasi

Parlementer, sedangkan PBB hanya menjadi partai kecil dengan pengaruh yang terbatas di era Reformasi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan adanya kesinambungan ideologis antara Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang (PBB), khususnya dalam menjadikan Islam sebagai dasar moral dan hukum dalam kehidupan bernegara. Keduanya memperjuangkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, musyawarah, serta penerapan syariat secara konstitusional. Namun, pengaruh politik keduanya sangat berbeda. Masyumi memiliki posisi kuat dalam pemerintahan pada era Demokrasi Parlementer, sedangkan PBB di era Reformasi menghadapi keterbatasan dukungan politik dan hanya berperan di ruang advokasi hukum serta wacana Islam politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun membawa semangat perjuangan yang serupa, perubahan konteks politik dan karakter pemilih pasca-Reformasi membatasi jangkauan politik PBB. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang kesinambungan dan perubahan dalam politik Islam Indonesia, serta menegaskan bahwa ideologi saja tidak cukup tanpa kemampuan beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2019). Penurunan Suara Partai Islam Pada Pemilu Legislatif : Partai Bulan Bintang (Pbb) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 81-92.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/6609>
- Al-Hamdi, R. (2013). *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Amri, K. (2024). *Kejayaan Hingga Kemerosotan Panji Bulan Bintang: Sejarah Partai Masyumi di Sulawesi Selatan Tahun 1950-an*. Universitas Hasanuddin.
- Anggiawan, S. A. (2015). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sekadau Tahun 2014. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 3(4), 1-20.  
[http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/816/0%0Ahttp://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/viewFile/816/pdf\\_21](http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/816/0%0Ahttp://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/viewFile/816/pdf_21)

- Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 37–57. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731>
- Asrofuddin, W., Huda, U., Hulhak, Z., & Bajuri, A. (2023). Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif Di Indonesia 1945-1960. *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(1), 25–34.
- Cecep Suryana, dkk. (2024). *Dinamika Politik Islam di Indonesia* (A. I. Setiawan (ed.)). Gunung Djati Publishing.
- Fadli, M. R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7927>
- Fahri, M. (2022). *Perjalanan dan Perkembangan Sistem Politik Indonesia dari Masa ke Masa Suatu Tinjauan Selayang Pandang*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, K. dan A. S. (2022). Sikap Politik Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pembubaran Partai Islam Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 1–20.
- Ibrahim, T. A. (2023). *Keruntuhan Masyumi dan Dampaknya Terhadap Pergerakan Politik Golongan Islam*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Iman, M. S. (2023). Analisis Partai Politik Islam Pra Hingga Pasca Kemerdekaan 1910-1960 : Sebuah Kajian Islam Formalis. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 49–65. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i1.18181>
- Irsyad, N. M. (2016). *Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Pengembangan Ideologi Partai Bulan Bintang*. UIN Walisongo Semarang.
- Ishaqro, A. H. (2015). DINAMIKA PARTAI MASYUMI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945 – 1949). *JURNAL AGASTYA*, 5(2), 27–41.
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2019). Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-*

- I, 6(4), 391–404. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745>
- Khumaidi, F. N., & Sumarno, S. (2021). Pemikiran Modern Islam dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1960. *Avatara, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/41054>
- Ma'afi, R. H. (2013). Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1), 77–95. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.77-95>
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2), 163–185. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2674>
- Nurdamarsah, T. (2018). Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(01), 21–28. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/herodotus/article/view/2874>
- Nurjannah. (2015). *Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Permatasari, I. (2014). *Kemunculan dan Menurunnya Partai Islam Ideologis Studi Tentang: Partai Bulan Bintang (PBB) 1999-2009*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, A. (2017). Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama. *Proceedings of National Seminar Reserch and Community Service Institute*, 159–165.
- Romli, L. (2020). Electoral Power Structure of Islamic Parties in Reform Era Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(2), 192–213. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.22865>
- Sahya, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. CV. Pustaka Setia.
- Saptohutomo, A. P. (2024). *Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/05/19/11450121/Profil-Fahri-Bachmid-Gantikan-Yusril-Ihza-Mahendra-Jadi-Ketum-Pbb>. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/11450121/profil-fahri-bachmid-gantikan-yusril-ihza-mahendra-jadi-ketum-pbb>

- Shobron, S. (2013). Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 14(No.1, Juni), 9–24.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3876/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1954-1960). *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban, Dan Informasi Islam*, 14(1), 89–103. [https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/614/pdf\\_19](https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/614/pdf_19)
- Supawi, T. I. (2023). Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 64–72.  
<https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6499>
- Thalib, B. (2019). Menurunnya suara pemilih terhadap partai islam. *Doctrinal*, 4(1), 988–998.
- Wiharsono, F. N. A. (2024). *Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi*. Penerbit BRIN.